

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran menjadi salah satu masalah besar di setiap negara berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran adalah kondisi dimana seseorang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan minim dengan sumber daya manusia yang besar adalah masalah yang sering ditemukan di negara berkembang yang akhirnya menyebabkan angka pengangguran menjadi tinggi. Menurut Sukirno (2006:14) pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada Agustus 2022 jumlah pengangguran yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia mencapai 8,4 juta orang. Dari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta memasuki lima besar provinsi dengan jumlah pengangguran 377.000 orang (BPS 2023)

Menurut Andriany (2013), untuk mengatasi pengangguran, dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan akses kepada

masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dengan memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya, karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. (Suhartini, 2005).

Pemerintah DKI Jakarta memiliki program pemberdayaan yaitu program JakPreneur atau Jakarta *Entrepreneurship*. JakPreneur merupakan program yang disediakan untuk pengembangan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kolaboratif dan menyediakan berbagai fasilitas untuk menstimulasi usaha di Jakarta. Jakpreneur merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta dengan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyempurnaan program OK OCE yang dimulai pada tahun 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Jakpreneur sebagai wadah untuk kreativitas, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan kewirausahaan.

Sebagai program yang mewadahi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaannya, terdapat tujuh perangkat daerah yang turut menyelenggarakan Program Jakpreneur yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi serta Dinas Sosial yang didampingi oleh para pendamping JakPreneur. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi para pendamping program JakPreneur ini memiliki tujuh proses pembinaan yang dikenal dengan 7P yaitu; P1 (Pendaftaran), P2 (Pelatihan), P3 (Pendampingan), P4 (Perizinan), P5 (Pemasaran), P6 (Pelaporan Keuangan), P7 (Permodalan). Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tercantum sasaran dari pengembangan kewirausahaan terpadu yaitu pengusaha pemula, pencari kerja, dan wirausaha naik kelas.

Menurut Edi Suharto (2009) keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada strategi pendampingan. Edi Suharto (2009) merumuskan kegiatan serta proses pendampingan sosial terdapat empat aspek tugas yang wajib dilakukan oleh pendamping dalam melakukan pendampingan sosial, yakni: (1) pemungkinan atau fasilitasi; (2) penguatan; (3) perlindungan; (4) pendukung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Singgih Wahyudiyana (2011), yang berjudul "Strategi pendampingan dalam pemberdayaan komunitas petani : Kajian terhadap pemberdayaan komunitas petani melalui kegiatan pendampingan sosial yang dilaksanakan sekretariat Bina Desa /INDHRRA Jakarta: Studi kasus pendampingan sosial komunitas petani di desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur" dari penelitian ini ditemukan bahwa melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas membuat pemberdayaan yang dilakukan lebih bersifat holistik dan integratif. Penelitian ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai

fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampungannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Afifuddin (2018) “Pendampingan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama” ditemukan bahwa pemberdayaan masyarakat mustahil dapat dilakukan tanpa pendampingan sosial. Pendampingan sosial adalah suatu proses “persahabatan profesional” yang terjadi dalam masyarakat rentan atau kurang beruntung untuk menemukan identitasnya yang utuh atau proses sosialisasi yang lebih luas sehingga terjadi proses transformasi dan demokratisasi khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Penelitian “Pendampingan Program JakPreneur Dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat” memiliki pembaruan yaitu meneliti terkait pendampingan yang dilakukan dalam Program JakPreneur dengan menggunakan sudut pandang pekerjaan sosial. Pendampingan Program JakPreneur memiliki beberapa poin fokus untuk membantu masyarakat. Melansir dari laman website resmi Jakpreneur, terdapat tujuh poin fokus pembinaan seorang pendamping kepada masyarakat yaitu pemasaran, pemodalannya, laporan keuangan, memberikan ide kreatif, melakukan pola pikir perubahan kewirausahaan, membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan, dan membentuk pelaku usaha yang unggul. Sehingga dalam pendampingannya, masyarakat benar-benar dibimbing untuk mampu mengembangkan usahanya dan melakukan inovasi untuk dapat memajukan usaha yang mereka tekuni.

Program JakPreneur Jakarta Barat dijalankan oleh dua orang pendamping. Berdasarkan data dari Pendamping JakPreneur, jumlah UMKM yang ikut serta dalam program JakPreneur Kecamatan Cengkareng berjumlah 84 UMKM. Dalam Program JakPreneur UMKM dibagi kedalam dua kategori yaitu UMKM pemula dan UMKM naik kelas. UMKM pemula adalah kategori untuk UMKM yang baru memulai usaha, perizinan usaha yang belum lengkap dan aset usaha yang masih rendah. Sedangkan UMKM Naik Kelas adalah UMKM yang mempunyai nilai aset > 20 juta rupiah, perizinan usaha sudah lengkap dan sudah memiliki karyawan. Permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan Program JakPreneur di lingkungan Kecamatan Cengkareng adalah rendahnya UMKM binaan JakPreneur yang berkembang. Hal ini dapat terlihat dari sedikitnya jumlah UMKM binaan JakPreneur yang sudah naik kelas hanya berjumlah lima UMKM dari 84 UMKM yang ada. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya UMKM binaan yang berkembang di Kecamatan Cengkareng.

Menurut informan pendamping program JakPreneur Jakarta Barat, dalam program JakPreneur pendamping berperan dalam pendampingan yang diberikan dalam Program JakPreneur kepada UMKM binaan JakPreneur yaitu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan manfaat, fasilitas, dan akses dalam program JakPreneur, serta melakukan pendampingan dan pembinaan bagi para peserta JakPreneur dari tahap pendaftaran (P1) sampai tahap permodalan (P7). Menurut pendamping program JakPreneur Jakarta Barat setiap UMKM di Kecamatan Cengkareng yang mengikuti Program JakPreneur akan mendapatkan pendampingan yang sama, terkait rendahnya jumlah UMKM yang naik kelas hal ini dikarenakan motivasi yang rendah dari UMKM

untuk mengembangkan usahanya, selain itu faktor lainnya pendamping kesulitan untuk mendampingi seluruh UMKM binaan JakPreneur yang sangat banyak. Tetapi menurut salah satu UMKM yang naik kelas, salah satu faktor utama yang membuat usahanya menjadi berkembang karena pendampingan yang diberikan oleh pendamping JakPreneur. Pendamping JakPreneur cenderung memberikan pendampingan yang lebih intens kepada UMKM yang berpotensi untuk naik kelas, sehingga terdapat beberapa UMKM yang kurang mendapat fokus pendamping. Pendampingan yang diberikan kepada UMKM yang berpotensi seperti akses untuk mengikuti bazaar, diprioritaskan ketika adanya pelatihan, dan akses ke peminjaman modal usaha.

Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan dari latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang pendampingan yang dilakukan oleh pendamping program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat dalam memberikan pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pendukung dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kecamatan Cengkareng.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Pendampingan Program JakPreneur dalam Pengembangan UMKM Di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat”. Rumusan masalah dijabarkan ke dalam sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendampingan Program JakPreneur dalam melaksanakan tugas pemungkinan (*enabling*)?
2. Bagaimana Pendampingan Program JakPreneur dalam melaksanakan tugas penguatan (*empowering*)?
3. Bagaimana Pendampingan Program JakPreneur dalam melaksanakan tugas perlindungan (*protecting*)?
4. Bagaimana Pendampingan Program JakPreneur dalam melaksanakan tugas pendukungan (*supporting*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai Pendampingan Program JakPreneur dalam Pengembangan UMKM. Di Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Pelaksanaan tugas pemungkinan (*enabling*) dalam Pendampingan Program JakPreneur
2. Pelaksanaan tugas penguatan (*empowering*) dalam Pendampingan Program JakPreneur
3. Pelaksanaan tugas perlindungan (*protecting*) dalam Pendampingan Program JakPreneur
4. Pelaksanaan tugas pendukungan (*supporting*) dalam Pendampingan Program JakPreneur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan sosial serta mampu menyumbangkan gagasan yang berkaitan dengan Pendampingan Program JakPreneur dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Cengkareng

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi solusi alternatif pemecahan masalah bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan Pendampingan Program JakPreneur dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Cengkareng.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, Berisi penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi: tinjauan tentang efektivitas, tinjauan tentang kewirausahaan sosial, tinjauan tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM), tinjauan tentang

program JakPreneur, dan tinjauan pekerjaan sosial, serta kerangka pemikiran

- BAB III** : METODE PENELITIAN, Berisi desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Berisi gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V** : USULAN PROGRAM , Berisi dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI** : KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian serta saran yang ditujukan untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman program pemecahan masalah.